

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Semester II 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode Januari sampai dengan 31 Desember 2021. Realisasi Pendapatan Negara pada Semester II TA 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.653.423.266,- atau mencapai 10.890.39% persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp.6.000.000,-. Realisasi Belanja Negara pada Semester II T.A 2021 adalah sebesar Rp.73.129.276.269,- atau mencapai 99 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.74.028.629.000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada Semester II 2021. Nilai Aset sebesar Rp.268.126.346.590,- dan 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp.280.589.908.793,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.3.506.031.055,- Aset Tetap (neto) sebesar Rp.264.580.768.535,-; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.39.547.000,-, Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.682.220.142,- dan Rp.267.444.126.448,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode Semester II 2021 adalah sebesar Rp.255.254.375,- sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp.82.593.529.731,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp.(82.338.275.356) Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp.(8.418.857.224),- dan sebesar Rp.(90.757.132.580) sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp.(90.757.132.580)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada Semester II 2021 adalah sebesar Rp.280.326.833.504.- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp.(90.757.132.580).- ditamba dengan koreksi-koreksi senilai Rp.(2.468.814.954) dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.80.343.240.478,- sehingga Ekuitas entitas pada Semester II 2021 adalah senilai Rp.267.444.126.448,-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode Semester II 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Semester II tahun 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR WILAYAH MALUKU LAPORAN REALISASI ANGGARAN SEMESTER II T.A 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATA	SEMESTER II T.A 2021		% thd Angg	TA 2020
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	6,000,000	653,423,266		70,449,382
JUMLAH PENDAPATAN		6,000,000	653,423,266	10890.39	205,457,622
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	40,420,660,000	40,178,989,144	99.40	36,642,082,372
Belanja Barang	B.4	33,408,799,000	32,751,117,125	98.03	23,531,911,280
Belanja Modal	B.5	199,170,000	199,170,000	100.00	13,311,730,125
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-		-
JUMLAH BELANJA		74,028,629,000	73,129,276,269	98.79	73,485,723,777

II. NERACA

KANTOR WILAYAH MALUKU NERACA Semester II TA 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2021	2020
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	19,200,000	9,500,000
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	14,000	-
Piutang bukan pajak	C.4	-	1,286,512
Penyisihan piutang tdk tertagi piutang bukan pajak	C.5	-	(6,432)
PITUANG BUKAN PAJAK (NETT)	C.6	-	1,280,080
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Tuntutan Perbendaharaan	C.7	-	9,228,119
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.8	-	(46,141)
BAGIAN LANCAR TTPTGR (NETO)	C.10	-	9,181,978
Persediaan	C.11	3,486,817,055	1,664,945,968
Persediaan Belum di register	C.12	-	-
Jumlah Aset Lancar		3,506,031,055	1,684,908,026
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.13	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.15	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.16	123,556,406,000	123,869,827,000
Peralatan dan Mesin	C.17	39,821,519,922	35,937,621,411
Gedung dan Bangunan	C.18	151,998,142,499	153,508,711,869
Gedung dan bangunan belum di register	C.19	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.20	176,735,352	62,510,000
Konstruksi dalam pengerjaan	C.21	-	9,862,636,432
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.22	(50,972,035,238)	(44,347,259,845)
Jumlah Aset Tetap		264,580,768,535	278,894,046,867
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.23	-	-
Aset Lain-Lain	C.24	2,846,085,450	1,216,383,050
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.25	(2,806,538,450)	(1,205,429,150)
Jumlah Aset Lainnya		39,547,000	10,953,900
JUMLAH ASET		268,126,346,590	280,589,908,793
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.26	19,200,000	9,500,000
Utang kepada Pihak Ketiga	C.27	663,020,142	253,575,289
Pendapatan Diterima di Muka	C.28	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.29	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	C.30	682,220,142	263,075,289
JUMLAH KEWAJIBAN		682,220,142	263,075,289
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	267,444,126,448	280,326,833,504
JUMLAH EKUITAS		267,444,126,448	280,326,833,504
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		268,126,346,590	280,589,908,793

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR WILAYAH MALUKU LAPORAN OPERASIONAL UNTUK SEMESTER II TA 2021 DAN 2020

URAIAN	CATATAN	2021	2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	255,254,375	110,790,592
JUMLAH PENDAPATAN		255,254,375	110,790,592
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	40,305,752,144	36,444,853,222
Beban Persediaan	D.3	3,219,642,474	2,065,706,199
Beban Barang dan Jasa	D.4	22,370,429,854	17,223,458,376
Beban Pemeliharaan	D.5	4,628,461,896	2,937,116,186
Beban Perjalanan Dinas	D.6	3,352,508,843	1,861,054,375
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	8,716,734,520	8,646,484,450
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	(73,579)
JUMLAH BEBAN		82,593,529,731	69,178,599,229
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(82,338,275,356)	(69,067,808,637)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus /defisit pelepasan aset non lancar		(8,749,449,821)	68,609,518
Pendapatan Pelepasan Aset non lancar		-	68,609,518
Beban Pelepasan Aset non lancar		8,749,449,821	-
surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya	D.12	330,592,597	159,573,625
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.13	330,592,597	188,993,345
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	-	29,419,720
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(8,418,857,224)	228,183,143
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(90,757,132,580)	(68,839,625,494)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(90,757,132,580)	(68,839,625,494)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR WILAYAH MALUKU LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE Semester II TA 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2021	2020
EKUITAS AWAL	E.1	280,326,833,504	276,702,312,438
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(90,757,132,580)	(68,839,625,494)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	(2,468,814,954)	(3,461,137,294)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.2	(33,167,025)	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	42,207,900	(8,153,139,926)
SELISIH REVALUASI ASET	E.3.4	(7,329,111,000)	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	4,794,140,935	4,685,035,476
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	57,114,236	6,967,156
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		80,343,240,478	75,925,283,854
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.4	(12,882,707,056)	3,624,521,066
EKUITAS AKHIR	E.5	267,444,126,448	280,326,833,504

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Maluku

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Kementerian hukum dan HAM RI No. 2005/BALAP.071/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Mempunyai Tugas dan Fungsi dalam Melakukan Koordinasi Dibidang Bimbingan dan Dukungan Implementasi Akuntansi Pemerintah dengan cakupan Wilayah Provinsi Maluku. Melalui peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku diharapkan kualitas laporan keuangan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan atas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku berkomitmen dengan visi dan misi:

“Masyarakat memperoleh kepastian hukum, melindungi hak asasi manusia”

Untuk mewujudkan visi misi tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan usaha-usaha yang berkelanjutan berkaitan dengan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual
2. Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi Keuangan yang dihasilkan

oleh system akuntansi berbasis akrual yang diimplemetasikan.

3. Mengembangkan system informasi yang andal dan terpecaya.

Menyelenggarakan system dukungan pengambilan keputusan kepada para pemangku kepentingan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. laporan keuangan kantor wilayah kementerian Hukum dan HAM Maluku khususnya pada jajaran Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggungjawab atas anggaran yang di berikan

Jumlah satuan kerja dilingkup kantor wilayah kementerian

Hukum dan HAM Maluku pada jajaran Direktorat jenderal Pemasaryakatan ada 19 satuan kerja sebagai berikut:

Rekapitulasi jumlah satuan kerja UAPPA-W

NO	Kode satker	Nama Satker	Jenis Kewenangan	Jumlah satuan
1.	632705	Rupbasan Ambon	KD	1
2	632527	Rutan Ambon	KD	1
3	408894	Div Pemasaryakatan	KD	1
4	407474	LP Tual	KD	1
5	407452	Lapas Kelas III Wonreli	KD	1
6	407421	Lapas Kelas III Banda	KD	1
7	407412	Lapas Kelas III Namlea	KD	1
8	407406	Rutan Masohi	KD	1
9	352613	LPKA	KD	1
10	109146	Bapas Ambon	KD	1
11	407380	Lapas Kelas IIA Ambon	KD	1
12	407437	Lapas Kelas III Geser	KD	1
13	407443	Lapas Kelas III Wahai	KD	1
14	407386	Lapas Kelas IIB Piru	KD	1
15	407392	Rutan Saparua	KD	1
16	407468	Lapas Kelas III Dobo	KD	1
17	407483	Lapas Kelas III Saumlaki	KD	1
18	418346	LPP Ambon	KD	1
19	632045	Bapas Saumlaki	KD	1
				19

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari

KUN.

- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan

atau harga wajar.

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah Melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan Terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan Semester I 2020. termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai

Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2021 dan 2020. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan Organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kengunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang pengelolaan BMN.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan

dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi

Pendapatan

Rp.653.423.266

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode Semester II 2021 adalah sebesar Rp.653.423.266.- atau mencapai 10.89 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.6.000.000. Pendapatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Angg.
pendapatan penjualan lainnya	6,000,000	7,945,250	-
Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin		-	-
Pendapatan sewa tanah dan gedung bangunan	-	96,277,805	-
Pendapatan Pelayanan dan Administrasi hukum lainnya		1,550,000	-
pendapatan penyelesaian TPTGR non bendahara	-	9,228,119	-
pendapatan penjualan hasil produksi non litbang	-	32,924,500	-
pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah		116,556,820	-
pendapatan penyelesaian TPTGR non bendahara		-	-
penerimaan kembali belanja pegawai TAYL		1,161	-
penerimaan kembali belanja barang TAYL		84,348,175	-
penerimaan kembali belanja modal TAYL		304,591,436	-
Pendapatan anggaran Lain-lain	-	-	-
Jumlah	6,000,000	653,423,266	0%

Realisasi Pendapatan Semester II TA 2021 mengalami peningkatan 154.45 persen dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan oleh penyelesaian temuan di tahun 2021 lebih besar dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku. Selain itu, Pendapatan Lain-lain Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku. mengalami peningkatan sebesar

10.890.39 persen yang berasal antara lain dari pendapatan pengembalian belanja pegawai dan belanja lainnya yang berasal dari tahun anggaran yang lalu.

Perbandingan Realisasi Pendapatan Semester II TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan penjualan hasil produksi non litbang	32,924,500	27,435,001	20.01
Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin	-	68,609,518	(100.00)
Pendapatan sewa Tanah dan Gedung	96,277,805	81,813,591	
Pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara	9,228,119	-	#DIV/0!
Pendapatan Pelayanan dan administrasi hukum lainnya	1,550,000	1,542,000	
Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah	116,556,820	11,000,000	959.61
Penerimaan Kembali belanja pegawai	1,161	6,100,345	(99.98)
Penerimaan Kembalibelanja barang TAYL	84,348,175	8,957,167	841.68
Penerimaan kembali Blj Modal YATL	304,591,436	-	
Pendapatan Jasa Lainnya	7,945,250	-	
Jumlah	653,423,266	205,457,622	218.03

Realisasi Belanja **B.2 Belanja**

Negara

Rp.73.129.276.269

Realisasi Belanja instansi Semester II TA 2021 adalah sebesar Rp.73.129.276.269 atau 99% dari anggaran belanja sebesar Rp.74.028.629.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Semester II TA 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester II TA 2021

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	40,420,660,000	40,178,989,144	99.40
Belanja Barang	33,408,799,000	32,751,117,125	98.03
Belanja Modal	199,170,000	199,170,000	100.00
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	74,028,629,000	73,129,276,269	98.79

Dibandingkan dengan Semester II TA 2021 Realisasi Belanja TA 2020 mengalami peningkatan sebesar 4.62 % dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Belanja Semester II TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI Semester II TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	40,178,989,114	18,038,171,056	122.74
Belanja Barang	32,751,117,125	10,246,139,103	219.64
Belanja Modal	199,170,000	869,202,000	(77.09)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	73,129,276,239	29,153,512,159	150.84

Belanja Pegawai **B.3 Belanja Pegawai**

Rp.40.178.989.144

Realisasi Belanja Pegawai Semester II TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.40.178.989.144,- dan Rp.36.642.082.372 Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan

pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 9.65 persen dari TA 2020. Hal ini disebabkan penambahan PNS pada jajaran Kumham Maluku tahun anggaran 2021

Perbandingan Belanja Pegawai Semester II TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI SMTR II TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	40,179,736,319	36,642,082,372	9.65
Jumlah Belanja Kotor	40,179,736,319	36,642,082,372	9.65
Pengembalian Belanja Pegawai	747,175	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja	40,178,989,144	36,642,082,372	9.65

Belanja Barang
Rp.32.751.117.125

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Semester II TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.32.751.117.125,- dan Rp.23.531.911.280,- Realisasi Belanja Barang Semester II TA 2021 mengalami kenaikan 39.19% dari Realisasi Belanja Barang TA 2020.

Perbandingan Belanja Barang Semester II TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI Semester II TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang	32,754,114,526	23,531,911,280	39.19
Jumlah Belanja Kotor	32,754,114,526	23,531,911,280	39.19
Pengembalian Belanja	2,997,401	-	
Jumlah Belanja	32,751,117,125	23,531,911,280	39.18

Belanja Modal

B.5 Belanja Modal

Rp.199.170.000

Realisasi Belanja Modal Semester II TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 199.170.000 dan Rp.13.311.730.125 Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Semester II TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal	199,170,000	13,311,730,125	(98.50)
Jumlah Belanja Kotor	199,170,000	13,311,730,125	-98.50
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	199,170,000	13,311,730,125	-98.50

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Semester II TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0. TA 2021 mengalami kenaikan/penurunan sebesar 0,- persen dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan belum selesai tahun anggaran.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Semester II TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0.00

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester II TA 2021 adalah sebesar Rp.199.170.000, mengalami penurunan sebesar 0 persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp.262.041.000.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester II TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Komputer Unit	-	-	-
Peralatan Komputer	99,000,000.00	262,041,000.00	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	#DIV/0!
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	99,000,000.00	262,041,000.00	-62%

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Semester II TA 2021 Rp.100.170.000 dan Rp.0 Realisasi Belanja Modal TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 100 persen dibandingkan Realisasi TA 2021.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Semester II TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Gedung dan Bangunan	100.170.000	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Modal	0	0	-
Jumlah Belanja	100.170.000	0	#DIV/0!

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Semester II TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0. Realisasi Belanja Modal Semester II TA 2021 tidak mengalami kenaikan dan penurunan sebesar 0,00 persen dibandingkan Realisasi TA 2021. Hal ini disebabkan tidak ada dana modal jalan, irigasi jaringan

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Semester II TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja modal jaringan	0	0	0.00
Belanja Modal Upah tenaga kerja	0	0	0.00
honor pengelolah teknis	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0.00

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya Semester II TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0. Realisasi Belanja Modal Lainnya Semester II TA 2021 tidak ada kenaikan/penurunan sebesar 0.00 persen dibandingkan Realisasi TA 2020. Hal ini disebabkan pengadaan *software* untuk mendukung implementasi akuntansi pendapatan berbasis akrual.

Belanja Bantuan Sosial Rp.0.

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Semester II TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Semester II 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Kelompok pendidikan	0	0	0,00
Kelompok pendidikan cendrawasi	0	0	0,00
honor pengelolah teknis	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp19.200.000

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Semester II T.A 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.19.200.00,- dan Rp.9.500.000,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Semester II TA 2021 dan
2020*

Keterangan	SEMESTER II TH 2021	TH 2020
KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN	19,200,000	9,500,000
	-	-
Jumlah	19,200,000	9,500,000

Kas di

.2 Kas di Bendahara Penerimaan

*Bendahara
Penerimaan
Rp.0*

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Semester II T.A 2021 dan 2020 adalah sebesar masing-masing Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Semester II TA 2021 dan
2020*

Keterangan	TH 2021	TH 2020
Kas di bendahara Penerima	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

*Kas Lainnya
dan Setara
Kas Rp.0*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas Semester II TA 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Semester II TA 2021 dan 2020

No	Keterangan	TH 2021	TH 2020
1	Kas lainnya dan setara kas	-	-
2			0
	Jumlah	-	-

Piutang 4 Piutang PNBP

PNBP

Rp.19.718.

344

Saldo Piutang PNBP Semester I TA 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp.19.718.344. dan Rp.1.280.080. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNBP Semester I TA 2021 dan 2020

No	URAIAN	TH 2021	TH 2020
1	Piutang PNPB	19,718,344	1,280,080
2	Utang kpd pihak ketiga	0	0
Jumlah		19,718,344	1,280,080

Bagian

Lancar

Tagihan

TP/TGR

Rp0.

5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi Semester II T.A 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.9.228.119. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR Semester II TA 2021 dan 2020

No	Nama	TH 2021	TH 2020
1	Ronal Tuasuun	-	-
2	Sugianto Basir	0	9,228,119
Jumlah		-	9,228,119

Bagian

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Lancar TPA Rp.0. Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) Semester II T.A 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp.0. dan Rp.0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA Semester II TA 2021 dan 2020

No	Nama	TH 2021	TH 2020
1		-	
2			
Jumlah		-	-

Penyisihan C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar Rp.0 Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar Semester II T.A 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp.(0) dan Rp (46.141)Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar Semester II TA 2021 dan 2020

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk PENDEK	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TP/TGR	-	0,50%	-
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Belanja C.8 Belanja Dibayar di Muka

Belanja Dibayar di Muka Rp.0.

Saldo Belanja Dibayar di Muka Semester II T.A 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp.0. dan Rp.0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka Semester II TA 2021 dan 2020

No	Jenis	TH 2021	TH 2020
1		-	
2			
	Jumlah	-	-

Pendapatan yang Masih Harus Diterima C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp.0

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Semester II TA 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp.0. dan Rp.0. merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai

berikut:

*Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima
Semester II TA 2021 dan 2020*

No	Jenis	TH 2021	TH 2020
1	Pendapatan jasa pelatihan	-	-
2	Pendapatan jasa pelayanan	-	-
Jumlah		-	-

C.10 Persediaan

Persediaan

Rp.3.486.817.

055

Nilai Persediaan Semester II T.A 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp.3.486.817.055 dan Rp.1.664.945.968

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan Semester II TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Semester II TA 2021 dan 2020

Jenis	TA 2021	TH 2020
Barang Konsumsi	3,190,589,128	846,939,468
Amunisi	29,053,346	809,661,500
Barang untuk Pemeliharaan	455,864,200	8,345,000
Bahan	-	-
Alat bahan utk kegiatan	-	-
Aset Lain-lain untuk diserahkan kepada masyarakat	-	-
Bahan Baku	-	-
Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	3,675,506,674	1,664,945,968

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam keadaan baik .

Tagihan

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

TP/TGR
Rp.0

(TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Semester II TA 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.9.228.119 Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Semester I TA 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR Semester II TA 2021 dan 2020

No	Uraian	TA 2021	TH 2020
1	Tagihan piutang TPTGR	-	9.228.119
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
6	-	0	0
Jumlah		-	9.228.119

Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp.0.

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitor adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TPA TA 2021 dan 2020

No	Uraian	TA 2021	TH 2020
1		0	
6	-	0	0
Jumlah		-	-

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Jangka
Panjang
Rp.0*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Semester II TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.(0) dan Rp.(46.141). Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Semester I TA 2021

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TP/TGR	-		(46,141)
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan		0%	-
Macet		0%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan		0%	-
Macet		0%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Tanah

Rp.123.556.4
06.000

C.14 Tanah

Tanah yang dimiliki Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku TA Semester II 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp.123.556.406.000 dan Rp.123.869.827.000 Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan TA 2021	123,869,827,000
Mutasi tambah:	19,125,000
Selisih revaluasi aset	0
Mutasi kurang:	332,546,000
Saldo TA 2021	123,556,406,000
Akumulasi Penyusutan TA 2020	-
Nilai Buku per 30 Juni 2021	123,556,406,000

Rincian saldo Tanah Semester I TA 2021 adalah sebagai berikut:

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	40,000	LP Ambon	12,353,491,000
2	110,250	LP Piru	53,540,324,000
3	2,054	Lapas Saparua	585,390,000
4	31,097	Rutan Masohi	29,112,855,000
5	29,090	Lapas Namlea	2,579,934,000
5	2,860	Lapas Banda	999,963,000
6	6,500	Lapas Geser	2,355,542,000
7	1,699	Lapas Wahai	215,003,000
8	1,725	Lapas Wonreli	113,440,000
9	5,342	Lapas Dobo	325,302,000
10	10,832	LP Tual	4,980,356,000
11	22,792	Lapas Saumlaki	5,891,162,000
12	10,000	Rutan Ambon	9,352,800,000
13	10,000	Rupbasan Ambon	1,464,265,000
Jumlah			123,556,406,000

*Peralatan dan
Mesin
Rp.39.821.51
9.922*

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin Semester II T.A 2021 dan 2020 adalah Rp.39.821.519.922 dan Rp.35.937.621.411., Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo TA 2021	35,937,621,411
Mutasi tambah:	0
Transfer Masuk	18,049,114,258
Reklasifikasi Masuk	0
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	0
Mutasi kurang:	0
Transfer Keluar	14,165,215,747
Reklasifikasi Keluar	-
Koreksi Pencatatan	-
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo TA 2021	39,821,519,922
Akumulasi Penyusutan TA 2021	0
Nilai Buku TA 2021	39,821,519,922

- Transfer Masuk dan transfer Keluar sebesar Rp.18.049.114.258,- dan Rp. 14.165.215.747,- (data terlampir)

Gedung dan Bangunan Rp.152.998.142.499

C.16 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan Semester II TA 2021 dan 2020 adalah Rp159.998.142.499,- dan Rp.153.508.711.869,- Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan TA 2021		153,508,711,869
Mutasi tambah:		-
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP		-
Reklasifikasi Masuk		12,879,618,432
Revaluasi Aset		
Barang Berlebih Hasil Inventarisasi		
Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi		
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset		
Koreksi Pencatatan Nilai Kuantitas		
Pengembangan melalui KDP		
Mutasi kurang:		
Koreksi semu hasil Penilaian kembali		
Reklasifikasi Keluar		14,390,187,802
Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi		
Saldo TA 2021		151,998,142,499
Akumulasi Penyusutan TA 2021		-
Nilai Buku TA 2021		151,998,142,499

Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp.0. **C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Jalan, Irigasi, dan Jaringan Semester II TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp.0 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan TA 2021	-
Mutasi tambah:	
Penambahan jaringan teknologi informasi	-
Mutasi kurang:	-
Reklasifikasi Keluar	-
Koreksi Pencatatan	-
Saldo TA 2020	-
Akumulasi Penyusutan TA 2021	-
Nilai Buku TA 2021	-

Aset Tetap Lainnya **C.18 Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat

Rp.176.735.352

dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya TA Semester II 2021 dan 2020 adalah Rp.176.735.352 dan Rp.62.510.000. sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan TA 2021	62,510,000
Mutasi tambah:	139,240,352
Mutasi kurang:	25,015,000
Koreksi Pencatatan	-
Saldo TA 2021	176,735,352
Akumulasi Penyusutan TA 2019	-
Nilai Buku TA 2020	176,735,352

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp.0*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan Semester II TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.9.862.636.432

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp.(50.972.035.238)*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Semester II TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing Rp.(50.972.035.238) dan Rp.(44.347.259.845) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Semester II TA 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Semester II
TA 2021 dan 2020*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	39,821,519,922	(30,278,730,548)	9,542,789,374
2	Gedung dan Bangunan	151,998,142,499	(20,682,404,690)	131,315,737,809
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	-
4	Aset Tetap Lainnya	179,735,352	(10,900,000)	168,835,352
Akumulasi Penyusutan		191,999,397,773	(50,972,035,238)	141,027,362,535

*Aset Tak
Berwujud
Rp.0.*

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) Semester I T.A 2021 dan 2020 adalah Rp.0. dan Rp.0.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

C.22 Aset Lain-Lain

*Aset Lain-
Lain
Rp.2.846.085.
450*

Saldo Aset Lain-lain Semester II T.A 2021 dan 2020 adalah Rp.2.846.085.450 dan Rp.1.216.383.050 Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo TA 2021	1,216,383,050
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	1,629,702,400
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan	-
- Penggunaan Kembali BMN Yang di hentikan	-
Saldo TA 2021	2,846,085,450
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku I TA 2021	2,846,085,450

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan
dan
Amortisasi
Aset Lainnya
Rp.(2.806.538
.450)*

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Semester II T.A 2021 dan 2020 adalah masing-masing Rp.(2.806.538.450) dan Rp.(1.205.429.150) Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Semester II TA 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Software	0	0	0
Jumlah	0	0	0
Aset Lain-lain	2,846,085,450	(2,806,538,450)	0
Jumlah	2,846,085,450	(2,806,538,450)	0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Uang Muka dari KPPN Rp.19.200.000

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN Semester II T.A 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp.19.200.000. dan Rp.9.500.000. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp.663.006.142

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga Semester II T.A 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.253.575.289. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Semester I TA 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Air	35,666,000	Tagihan air bulan Desember 2021 yang dibayarkan bulan Januari 2022
Listrik	14,101,852	Tagihan listrik bulan Desember 2021 yang dibayarkan bulan Januari 2022
Telpon	1,213,800	Tagihan listrik bulan Desember 2021 yang dibayarkan bulan Januari 2022
		Tagihan listrik bulan Desember 2021 yang dibayarkan bulan

Pendapatan
Diterima di
Muka
Rp.0.

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka Semester II T.A 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

Beban yang
Masih Harus
Dibayar Rp0

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar Semester II T.A 2021 dan 2020 sebesar Rp.0. dan Rp.0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Air		
		<i>TA 2021 dan TA 2020</i>
Listrik		
Telpon		
Internet		
Bahan Makanan Napi	-	
Tunjangan kinerja	-	
Belanja Pegawai		
honor supir	-	
belanja sewa mobil	-	
Total	-	

Ekuitas C.28 Ekuitas

Rp.267.444.12
6.448

Ekuitas Semester II T.A 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.267.444.126.448,- dan Rp.280.326.833.504. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan PNPB
Rp.653.423.266

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk Semester II TA 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp.653.423.266 dan Rp.205.457.622 Pendapatan tersebut.

Pendapatan Negara Bukan Pajak Semester II TA 2021 dan 2020

URAIAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan penjualan hasil produksi	32,924,500	27,435,001	
Pendapatan penjualan gedung dan bangunan	0	68,609,518	
Pendapatan sewa gedung dan bangunan	96,277,805	81,813,591	
Pendapatan penyelesaian TGR non bendahara	9,228,119	11,000,000	
Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan	116,556,820	0	
penerimaan kembali belanja peg TAYL	1,161	6,100,345	
penerimaan kembali belanja barang TAYL	84,348,175	8,957,167	
penerimaan kembali belanja modal TAYL	304,591,436	-	
Pendapatan pelayanan dan administrasi hukum lainnya	1,550,000	1,542,000	
pendapatan anggaran lain-lain	7,945,250	-	
Jumlah	653,423,266	205,457,622	218

Pendapatan Lain-Lain merupakan pengembalian belanja pegawai dan belanja lainnya yang berasal dari transaksi Semester II 2021

Beban Pegawai
Rp.40.178.989.144

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Semester II TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.40.178.989.144 dan Rp 36.642.082.372 Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Pegawai Semester I TA 2021 dan 2020

URAIAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pegawai PNS	26,524,128,970	36,444,853,222	(27)
beban pembulatan gaji PNS	509,506		
beban tunj.suami/istri PNS	1,508,823,040		
Beban tunj anak PNS	447,400,248		
beban tunj struktural PNS	656,160,000		
beban tunj fungsional PNS	2,227,810,000		
beban tunj pph PNS	13,683,015		
beban tunj beras PNS	1,619,421,540		
beban uang makan	6,961,547,000		
beban tunj umum	2,945,000		
Beban Lembur	217,308,000		
Jumlah	40,179,736,319	36,444,853,222	10

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp.3.219.642.474

Jumlah Beban Persediaan pada Semester II TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.3.219.642.474,- dan Rp.2.065.706.199,- Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai,

termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Semester II TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Beban Persediaan Semester II TA 2021 dan 2020

URAIAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan	3,219,642,474	2,065,706,199	56
Beban persediaan bahan untuk pemeliharaan			
beban Amunisi			
beban persediaan pita cukai			
beban persediaan bahan baku			
beban persediaan tujuan jaga-jaga			
Beban Persediaan Lainnya			
beban penyusian nilai persediaan			
beban persediaan pita, cukai, legas			
Jumlah	3,219,642,474	2,065,706,199	56

*Beban Barang dan
Jasa
Rp.22.370.429.854*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Semester II TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.22.370.429.854 dan Rp.17.223.458.376. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Semester II TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Beban Barang dan Jasa Semester II TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban barang dan jasa	22,370,429,854	17,223,458,376	29.88
Jumlah	22,370,429,854	17,223,458,376	29.88

*Beban
Pemeliharaan
Rp4.628.461.896*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Semester II TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.4.628.461.896 dan Rp.2.937.116.186. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan karena adanya penghematan pada pemeliharaan peralatan dan mesin. Rincian beban pemeliharaan untuk Semester II TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut

Rincian Beban Pemeliharaan Semester I TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan	4,628,461,896	2,937,116,186	57.59
Jumlah	4,628,461,896	2,937,116,186	57.59

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp.3.352.508.843*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Semester II TA 2020 dan 2018 adalah

masing-masing sebesar Rp3.352.508.843 dan Rp.1.861.054.375. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Semester II TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Semester II TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Dinas	3,352,508,843	1,861,054,375	80.14
	0	0	0.00
Jumlah	3,352,508,843	1,861,054,375	80.14

*Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada Masyarakat
Rp.0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Semester II TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Semester II TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Semester TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	Semestet I TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Barang diserahkan kepada masyarakat	0	0	#DIV/0!
	0	0	0,00
Jumlah	0	0	#DIV/0!

Beban Bantuan Sosial Rp.0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Semester II TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Semester II TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial Semester II TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Beban bantuan sosial	0	0	#DIV/0!
	0	0	0,00
Jumlah	0	0	#DIV/0!

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp.8.716.734.520

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Semester II 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.8.716.734.520 dan Rp 8.646.484.450 Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Semester II 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA Semester II 2021 dan 2020

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan dan Amortisasi	8,716,734,520	8,646,484,450	-
			-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	8,716,734,520	8,646,484,450	

*Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp.0*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Semester II 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.(73.579) Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Semester II 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Semester II TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	92,655	(73,579)	-226%
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	0	0	0%
Jumlah	92,655	(73,579)	-2.26

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp.(8.418.857.224)*

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Semester II 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional Semester II TA 2021 dan 2020

URAIAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
kegiatan non operasional lainnya	330,592,597	228,183,143	44.88
Penjualan Alat Kantor	0	0	#DIV/0!
Selisih Kurs	0	0	#DIV/0!
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan *)	0	0	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	330,592,597	228,183,143	44.88

**)Pendapatan/BebanPenyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

*Pos Luar Biasa
Rp.0*

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Semester II 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa Semester II TA 2021 dan 2020

URAIAN	Semester I 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNPB	0	0	#DIV/0!
Beban Perjalanan Dinas	0	0	#DIV/0!
Beban Persediaan	0	0	#DIV/0!
Jumlah	0	0	#DIV/0!

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp.280.326.833.504

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas Semester II 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.280.326.833.504 dan Rp276.702.312.438

Defisit LO

Rp.(90.757.132.580

)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk Semester II 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp.(90.757.132.580) dan Rp(68.839.625.494) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai

Aset

Rp0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk Semester II 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0 Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

Persediaan

Rp.42.207.900

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk Semester II 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.42.207.900 dan Rp.0

Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
koreksi nilai persedian	-
Jumlah	-

Selisih Revaluasi
Aset
Tetap Rp.(7.329.111
.000)

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk Semester II T.A 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.(7.329.111.000) Selisih Revaluasi Aset Tetap tersebut berasal dari penilaian ulang atas tanah, gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan berupa jalan jembatan dan bangunan air.

Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi
Rp4.794.140.935

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk Semester II T.A 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp.4.794.140.935 dan Rp.4.685.035.476 Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Semester II T.A 2021

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	4,794,140,935
	-
	-
	-
	-
Jumlah	4,794,140,935

Koreksi Lain-
Lain
Rp.57.114.236

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk Semester II T.A 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp.57.114.236 dan Rp.0 Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis beban	jumlah koreksi
koreksi beban	57,114,236
koreksi pendapatan	
koreksi piutang	
koreksi kewajiban	
koreksi hibah	
Jumlah	57,114,236

E.4 Transaksi Antar Entitas

*Transaksi Antar
Entitas Rp
80.343.240.478*

Nilai Transaksi Antar Entitas Semester II T.A 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.80.343.240.468 dan Rp.75.925.283.854 Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Transaksi Antar Entitas	80,343,240,478
	-
Jumlah	80,343,240,478

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode Semester II T.A 2021 dan 2020, DDEL sebesar Rp.0 sedangkan DKEL sebesar Rp.0

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan Semester II TA 2021 sebesar Rp 0 terdiri dari:

Jenis	Entitas awal	Nilai	
Peralatan dan mesin	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

Sedangkan Transfer Keluar sampai Semester II TA 2021 sebesar Rp.0.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung

Semester II TA 2021 sebesar Rp.0-. dari total Rp.0,- yang diterima sepanjang Semester II TA 2021.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung Semester II TA 2021 adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah untuk Semester II TA 2021 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	-	Uang	Rp -
2	-	Barang	Rp -
Total Pengesahan			Rp -
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
Jumlah			Rp -

Ekuitas Akhir

Rp.267.444.126.448

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada Semester II TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.267.444.126.448,- dan Rp.280.326.833.504,-

A. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

Terdapat buku minus BMN pada E-Rekon Satker LPKA dan

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Masih terdapat kas di bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 19.200.000

Terdapat pada satker :

1. Lapas Saparua Sebesar Rp.19.200.000,-

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Belanja Covid-19 yang terealisasi sebesar Rp. 624.350.769 atau sebesar 97.52% dari pagu anggaran sebesar Rp. 640.249.000

